

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Maisir di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Maisir atau perjudian merupakan salah satu bentuk jarimah yang dilarang dalam qanun tersebut dan diancam dengan sanksi *'uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda emas, atau penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi qanun ini telah dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kasus perjudian di Kecamatan Banda Sakti. Aspek komunikasi dinilai belum efektif karena penyebaran informasi yang dilakukan hanya terbatas pada media stiker dan sosialisasi ke sekolah, tanpa memanfaatkan saluran digital yang lebih relevan dengan karakteristik masyarakat saat ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya disposisi dan komitmen dari aparat juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih modern, kolaboratif, dan partisipatif, serta peningkatan kapasitas aparat dan infrastruktur hukum agar qanun ini dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Maisir, Qanun Jinayat, Banda Sakti, Hukum Syariah

ABSTRACT

This study examines the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law on Maisir (gambling) in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. Maisir, defined as betting or games of chance involving profit and loss, is categorized as a criminal offense under Islamic law in Aceh and is punishable by uqubat ta'zir lashes, fines in gold, or imprisonment. The research aims to analyze the extent of the Qanun's implementation and to identify the inhibiting factors in its enforcement. A qualitative descriptive approach was employed, using data collection methods such as interviews, field observations, and documentation involving law enforcement officers, religious leaders, academics, and community members. The findings indicate that the implementation of the Qanun has been suboptimal, as evidenced by the persistently high number of gambling cases in the region. The communication strategies adopted such as the use of stickers in public places and school-based outreach have proven inadequate in effectively reaching all segments of the population, especially the youth. The absence of digital-based information dissemination has hindered the spread of awareness. In addition, limited human resources, financial constraints, and weak institutional commitment have further impaired enforcement efforts. It is crucial to adopt more innovative, inclusive, and technology-based communication methods, alongside enhancing the capacity of enforcement institutions and infrastructure, to ensure consistent and effective implementation of the Qanun.

Keywords: Policy Implementation, Maisir (Gambling), Qanun Jinayat, Banda Sakti, Sharia Law